

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN PENGURUS KOPERASI JASA KEUANGAN

Ety Rahayu¹

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) sebagai unit pelaksana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEMK) kepada para pengurus/pengelola Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) sebagai mitra UPDB dalam melaksanakan program PEMK tersebut. Penelitian dilakukan di KJK PEMK Kelapa Gading Barat, yang merupakan KJK PEMK yang dianggap lancar dalam pengembalian dana angsuran. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif, dan teknik pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya pemberdayaan dari pihak UPDB kepada pengurus/pengelola KJK PEMK, terutama dalam bentuk capacity building. Hal ini dimaksudkan agar para pengurus/pengelola KJK PEMK tersebut memiliki kemampuan dalam mengelola KJK PEMK.

ABSTRACT

This research was conducted to find out the empowerment effort done by DKI Jakarta Provincial Government through technical unit namely Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) as implementing unit of Community Economic Empowerment Program (Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan) to the administrators/managers of cooperatives or Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) as partner of UPDB in implementing the this program. The research was conducted at KJK PEMK Kelapa Gading Barat, which is KJK PEMK which is considered smoothly in installment refund. The research was conducted using qualitative approach, with descriptive research type, and informant selection technique was done by purposive sampling. Findings of research indicate that there are efforts of empowerment from UPDB to administrators/managers of KJK PEMK, especially in the form of capacity building. It is intended that the administrators / managers KJK PEMK has the ability to manage KJK PEMK.

KEYWORDS: Empowerment, cooperatives, capacity building

¹ Staf Pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia

PENDAHULUAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) merupakan program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memberdayakan usaha mikro yang ada di kelurahan melalui bantuan permodalan. (Buku Saku, 2013: 9) Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, yaitu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) ini merupakan kelanjutan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), yang diluncurkan pada tahun 2001, dalam rangka untuk merespons krisis moneter tahun 1998. (Sakethi, 2010: 3) Tujuan awal PPMK adalah untuk memberdayakan warga Jakarta yang kurang mampu dengan memberikan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro. Program diperkuat dengan 2 (dua) jenis hibah, yaitu Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial, yang bertujuan untuk memperkuat jaring-

gan masyarakat di tingkat kelurahan, dengan mendorong kerjasama antar individu untuk menumbuhkan “modal sosial” atau rasa saling percaya antar warga. (Sakethi, 2010: 3) Jadi PPMK ini pendekatannya melalui Tri-bina sebagai model pendekatan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat RW di kelurahan, yaitu meliputi Bina Fisik Lingkungan (20%), Bina Sosial (20%), dan Bina Ekonomi (60%). (Sakethi, 2010: 3) Sejak bulan Oktober tahun 2009 dana bergulir PPMK dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) dibawah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kemiskinan memang merupakan masalah yang kompleks. Banyak ahli yang mendefinisikan kemiskinan. Nolan dan Whelan mendefinisikan kemiskinan dari segi ketidakmampuan untuk berpartisipasi di dalam masyarakat (lebih luas dari pada definisi absolut yang terbatas pada kebutuhan subsisten), tetapi menekankan pada ‘ketidakmampuan untuk berpartisipasi karena kurangnya sumberdaya’. Jadi batas dari definisi mereka adalah pada bidang-bidang kehidupan dimana konsumsi dan partisipasi ditentukan terutama oleh penguasaan atas sumber-sumber keuangan (Veit-Wilson dalam Lister, 2004: 13).

Masyarakat miskin yang menjadi sasaran PEMK adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha tetapi kurang atau tidak

memiliki akses permodalan. Dengan adanya dana bergulir dari PEMK dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses permodalan bagi masyarakat di kelurahan yang bersangkutan. Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat kelurahan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan
3. Menciptakan lapangan kerja baru. (Buku Saku Pemantapan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir, 2013: 14)

Dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), Unit Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta. (UPDB) bermitra dengan Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK). Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang menjadi mitra Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (UPDB PEMK) dalam pengelolaan dana

bergulir. KJK PEMK ini merupakan badan usaha yang bebas dan mandiri yang menjadi mitra Lurah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

KJK PEMK Kelapa Gading Barat merupakan salah satu KJK yang dianggap “lancar” dalam pengembalian dana bergulir kepada UPDB. Lancar disini maksudnya adalah bahwa KJK PEMK Kelapa Gading Barat selalu membayar angsuran kepada UPDB sesuai jadwal yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPDB, pada tahap awal setiap KJK PEMK mendapatkan dana sebesar Rp 540 juta rupiah. Lalu setelah itu mereka bisa mengajukan tambahan dana kembali. KJK PEMK Kelapa Gading Barat termasuk KJK PEMK yang paling lancar dalam mengembalikan angsuran kepada UPDB, karena itu KJK ini kembali mendapatkan pinjaman dana bergulir selama beberapa kali hingga memperoleh pinjaman dana bergulir yang lumayan besar dari UPDB.

Sebagai upaya pemberdayaan, program ini tentu harus memberdayakan pengurus dan anggota KJK PEMK. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan salah satu strategi yang penting dalam *people-centered development*, karena pada dasarnya *people-centered development* adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang memberdayakan rakyat.

Karena menurut Korten, pembangunan bukanlah sekedar hasil ekonomi yang bertumbuh dengan sederhana dan tidak

terbagi-bagi, tetapi pembangunan haruslah *people-centered development*, yaitu sebagai proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. (Korten, 2002: 110)

Karena itu menarik untuk diteliti bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh UPDB terhadap pengurus dan pengelola KJK PEMK, khususnya KJK PEMK Kelapa Gading Barat sehingga mereka bisa lancar dalam pengembalian angsuran kepada UPDB.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif agar diperoleh data yang lebih mendalam dan dapat diperoleh makna dan pengertian dari sudut pandang informan. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Berg dalam Minichiello (1995: 9) bahwa “*Qualitative research attempts to capture people’s meanings, definitions and descriptions of events*”. Jadi menurut Berg, penelitian kualitatif berusaha untuk menangkap makna, pengertian dan deskripsi dari peristiwa.

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, yang menurut Neuman mer-

upakan suatu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan situasi, kondisi, gejala, maupun hubungan sosial, yang akan menghasilkan gambaran subyek secara mendetail. (Newman, 2006: 21-22). Teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian literatur, studi dokumen, wawancara, dan observasi.

Adapun teknik pemilihan informannya dilakukan dengan *purposive sampling*, dengan menentukan informan yang paling mengetahui permasalahan. Neuman (2006: 222) mengemukakan bahwa *purposive sampling* tepat digunakan untuk memilih kasus-kasus yang unik. Dalam penelitian ini dipilih Kepala Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang mengetahui kebijakan tentang dana bergulir KJK PEMK dan upaya pemberdayaan terhadap KJK PEMK; Kepala Seksi Penyaluran dan Penagihan UPDB, sebagai pihak yang mengetahui tentang kondisi dan permasalahan KJK PEMK di DKI Jakarta; Koordinator Wilayah/ Penanggung Jawab KJK PEMK Jakarta Utara, sebagai pihak yang memahami kondisi dan permasalahan KJK PEMK di wilayah Jakarta Utara; Pengurus dan Pengelola KJK PEMK Gading Barat, yang terdiri dari Ketua, bendahara, manajer, kasir dan pembukuan karena memahami tentang permasalahan penelitian.

HASIL

Untuk meningkatkan kinerja pengu-

rus dan pengelola KJK, UPDB melakukan pemberdayaan dengan melakukan sejumlah pelatihan bagi mereka. Upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan memiliki tujuan agar kinerja KJK PEMK dapat maksimal, dimana diharapkan pengurus ataupun pengelola bisa mengelola keuangan KJK PEMK, bisa mengelola anggota KJK PEMK. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasie Penyaluran dan Penagihan UPDB:

“Tujuannya ya memang untuk memaksimalkan kinerja di KJK itu ya...kalo pelatihan itu tadi berdampak positif kepada pengurus KJK nanti sehingga pengelolaan itu kepada masyarakat memberikan pelayanan yang lebih maksimal...”(Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan)

Dari ungkapan di atas dapat dikemukakan bahwa upaya pemberdayaan di PEMK terutama ditujukan untuk memberdayakan KJK sebagai suatu institusi agar dapat maksimal kinerjanya. Mengenai pelatihan apa saja yang pernah diberikan untuk pengurus, Korwil KJK Jakarta Utara mengemukakan:

“Kalau pelatihan itu... Kalau KJK itu intinya secara organisasi ada pengawas, pengurus dan pengelola... nah pembinaan tuh buat mereka semua... terlebih fokus lagi ke pengelo-

la... lebih spesifik lagi diklatnya... Ada diklat untuk manajer, diklat untuk pembukuan ada diklat buat marketing...Tapi kalau untuk pengurus... global... tentang perkoperasian...”(Dnd, Korwil)

Jadi dari penjelasan Korwil KJK Jakarta Utara dapat dikemukakan bahwa untuk pengurus pelatihan yang diberikan bersifat global tentang materi perkoperasian, sedangkan untuk pengelola, pelatihan spesifik sesuai dengan jabatan masing-masing, seperti ada diklat manajer, diklat untuk pembukuan, diklat untuk marketing. Diklat bagi pengelola memang lebih spesifik karena merekalah yang mengelola KJK, jadi harus mengetahui teknisnya, sedangkan pengurus lebih sebagai pengambil kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh UPDB (baik oleh UPDB sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain seperti Balai Diklat Koperasi, Sudin Jakarta Timur ataupun lembaga konsultan independen) untuk meningkatkan kompetensi pengurus/pengelola antara lain pelatihan sertifikasi kompetensi (diklat) bagi pengelola KJK, pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi, peningkatan motivasi dan kerjasama individual melalui outbond, serta studi banding.

1. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi

Salah satu pelatihan yang diberikan bagi pengurus/pengelola KJK adalah pelatihan sertifikasi kompetensi, terutama bagi manajer KJK. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua UPDB :

“...dulu gencar itu pelatihannya... awal-awal berdirinya KJK... kompetensi manajer ... Kalo sekarang kan mereka umumnya udah ikut pelatihan...”
(Rcd, Ka UPDB)

Pelatihan kompetensi manajer memang khas karena setelah ikut pelatihan, para manajer KJK ini harus mengikuti ujian kompetensi. Bila mereka lulus uji kompetensi tersebut, maka mereka memiliki sertifikat manajer, yang bahkan bisa digunakan untuk bekerja di tempat lain. Ada beberapa manajer KJK PEMK yang sudah memiliki sertifikat manajer ternyata pindah kerja ke tempat lain, tidak lagi di KJK. Makanya sekarang sertifikat aslinya disimpan oleh UPDB, tidak diberikan kepada manajer KJK, mereka hanya mendapat fotokopiannya saja yang dilegalisir. Sebagaimana dikemukakan Kasie Penyaluran dan Penagihan UPDB:

“Iya... kan untuk mereka mendapatkan sertifikat itu... tapi kalo sekarang itu sertifikat yang aslinya gak kita keluarkan... nanti... mereka malah cari kerja

yang lain... kita kasih yang fotokopiannya aja trus dilegalisir gitu...” (Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan)

Ternyata uji kompetensi bagi manajer KJK PEMK bukanlah seleksi sifatnya, tetapi lebih merupakan pembekalan saja. Karena yang memilih manajer KJK PEMK adalah pengurus KJK PEMK, bukan UPDB. Semua manajer KJK PEMK di DKI Jakarta ini diikutsertakan dalam diklat kompetensi manajer. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koordinator/penanggung jawab KJK wilayah Jakarta Utara:

“...materinya saya nggak tau secara detail itu... manajer didiklatkan dan setelah itu diujikan... uji kompetensi... biasanya 1 minggu... itu sebenarnya nggak berpengaruh sama jabatan... itu lebih pada pembekalan, bukan sebagai seleksi...” (Dnd, Korwil)

Selain manajernya, ternyata bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat juga pernah ikut pelatihan kompetensi, bahkan ia dapat sertifikat, yang berarti bahwa bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat ini lulus uji kompetensi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat:

“...pernah ikut pelatihan kom-

petensi juga... dapat sertifikat... waktu itu dari Balai Diklat Koperasi kerjasama dengan UPDB...” (Nn, B-KGB)

Pak Bus, ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat menambahkan bahwa bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat pernah ikut pelatihan kompetensi khusus bendahara:

“Iya... kalo pelatihan kompetensi dapat sertifikat... Yang Mas Nn ikuti itu memang khusus untuk bendahara...” (Bus, K-KGB)

Lembaga yang mengadakan uji kompetensi bagi manajer adalah lembaga independen. Mereka yang mengikuti uji kompetensi tersebut memang ada yang lulus, ada juga yang tidak. Bagi yang lulus, tentu saja diberikan sertifikat kompetensi. Pada awal program PEMK diluncurkan, UPDB yang memfasilitasi pelatihan tersebut. Tetapi bagi mereka yang tidak lulus, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri bila ingin mengulang uji kompetensi tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasie Penyaluran dan Penagihan :

“...sebenarnya yang mengadakan itu kan lembaga yang bergerak di bidang itu... independen... seharusnya mereka yang ngga lulus itu ya meneruskan sampai lulus... biaya sendiri... kan awal-awal biaya

UPDB... Seharusnya ya sampai lulus...” (Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan)

Para pengurus dan pengelola KJK PEMK memang sebaiknya mengikuti pelatihan sertifikat kompetensi ini, karena pelatihan ini akan membekali para pengurus ataupun pengelola KJK PEMK di dalam mengelola KJK PEMK. UPDB menawarkan kepada KJK yang pengurus atau pengelolanya belum bersertifikat untuk ikut pelatihan sertifikasi kompetensi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasie Penyaluran dan Penagihan:

“Kita tawarkan... kita ajak beberapa KJK yang pengurus atau pengelolaannya belum bersertifikat...sesuai dengan kebutuhan aja sih... maksudnya bagi pengurus yang memang mau mengajukan...” (Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan)

Adapun materi dari pelatihan kompetensi ini antara lain pembukuan dan laporan keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat:

“...materinya laporan keuangan, pembukuan...” (Nn, B-KGB)

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa UPDB bekerjasama dengan lembaga independen telah melakukan pelatihan kompetensi manajer. Pelatihan kompetensi ma-

najer disini sifatnya untuk pembekalan dan pengembangan diri manajer KJK PEMK. Bukan sebagai seleksi. Karena yang memilih atau mengangkat seseorang menjadi manajer KJK PEMK adalah pengurus KJK PEMK, tidak masalah apakah ia lulus uji kompetensi manajer atau tidak.

2. Pelatihan untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan Pengurus/Pengelola

Ada beberapa pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus maupun pengelola, antara lain Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Koperasi (RAPBK), Pelatihan Pembukuan dan Pemasaran, Workshop Manajemen Resiko, dan kegiatan Peningkatan Kinerja KJK PEMK

2.1. Pelatihan Penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Koperasi (RAPBK)

Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pengelola dalam menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Koperasi (RAPBK). Karena itu yang ikut pelatihan ini umumnya bendahara. Manajer KJK PEMK Kelapa Gading Barat menuturkan bahwa Mas Nn, bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat pernah mengikuti pelatihan tersebut

“... Nah kemarin Mas Nn nih baru ikut seminar untuk mem-

buat RAPBK, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi...” (AS, M-KGB)

Pernyataan manajer KJK PEMK Kelapa Gading Barat tersebut diamini oleh bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat, mas Nn:

“Iya... pelatihan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun 2015... pesertanya setiap KJK diwakili 1 orang, siapa aja, ngga harus bendahara... Kebetulan saya bendahara yang ikut... kebanyakan sih manajer... ini yang ngasih materi dari koperasi lain... narasumber banyak dari UPDB...” (Nn, B-KGB)

Pelatihan RAPBK ini diadakan karena RAPBK yang dibuat oleh KJK belum memenuhi harapan UPDB. Sebagaimana dituturkan bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat:

“Kita udah bikin RAPBK dari 2 tahun lalu... Waktu itu dijelaskan sama orang UPDB... Kalo sebelumnya kita buat ya versi kita aja...kita kan RAT 3 kali... setiap RAT kan kita bikin RAPBK... tapi masih ada yang kurang. Kita jadi lebih tahu

lah... ” (Nn, B-KGB)

Pak Bus, ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat menambahkan:

“Kita sudah buat RAPBK ini sejak 2 tahun lalu...Tapi setelah itu karena setiap koperasi modelnya berbeda-beda, maka oleh UPDB disamakan...” (Bus, K-KGB)

Pelatihan RAPBK ini memang wajib diikuti oleh para pengelola KJK PEMK karena UPDB perlu mengetahui berapa anggaran yang direncanakan oleh masing-masing KJK dalam tahun berjalan, berapa dana yang diharapkan dari UPDB, dan seterusnya. Sebagaimana dikemukakan Penanggung Jawab/Koordinator KJK Wilayah Jakarta Utara:

“Karena disitu kan UPDB bakal ngukur kira-kira KJK ini secara keseluruhan se-DKI butuh modal berapa....Nanti tinggal realisasinya... kalo memang tidak buat, ya berarti gak bertanggungjawab terhadap organisasi ini... Mau ngapain? Mau berjalan ngalir... tapi kan gak bisa seperti itu...” (Dnd, Korwil)

Penyusunan RAPBK ini sangat ditekankan oleh UPDB, karena UPDB berharap setiap KJK memiliki perencanaan yang jelas. UPDB ingin mengetahui bagaimana rencana KJK untuk merealisasikan rencana tersebut.

Sebagaimana dikemukakan Kasie Penyaluran dan Penagihan UPDB:

“Iya... supaya koperasi itu punya perencanaan... melaksanakan sesuai dengan rencana tadi... Berapa rencana pendapatan dia, bagaimana upaya dia untuk mencapai target itu sehingga yang direncanakan itu tercapai...” (Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan)

Sebenarnya RAPBK dari setiap KJK diminta setiap tahunnya. Hanya saja seringkali para pengurus/pengelola KJK mengabaikannya. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat sudah mengikuti pelatihan yang diwajibkan bagi bendahara KJK PEMK, agar mereka memiliki kemampuan dalam menyusun RAPBK selama satu tahun ke depan, hal yang memang amat diperlukan oleh KJK, sebagai suatu organisasi. Hasil dari pelatihan RAPBK tersebut, peserta pelatihan jadi lebih mengerti tentang model RAPBK yang diharapkan oleh UPDB. Sebagaimana yang dialami mas Nn, bendahara KJK PEMK Kelapa Gading Barat, ia jadi lebih mengerti tentang RAPBK yang diharapkan oleh UPDB. Sebagaimana yang dikemukakan mas Nn:

“Yah...menambah wawasan... jadi lebih ngerti...kita jadi lebih ngerti seperti yang dimauin sama UPDB... tadinya kita

ngga ngerti... jadi lebih ngerti deh...” (Nn, B-KGB)

2.2. Pelatihan Pembukuan dan Pemasaran

Pelatihan pembukuan dan pemasaran ditujukan bagi para pengelola yang bertugas di bagian pembukuan ataupun pemasaran, untuk meningkatkan kemampuan mereka di dalam melakukan tugasnya. Dari KJK PEMK Kelapa Gading Barat yang ikut pelatihan tersebut adalah mba Vn, staf pembukuan. Kebetulan di KJK PEMK Kelapa Gading Barat tidak ada staf marketing khusus. Sebagaimana dikemukakan dikemukakan mba Vn, staf pembukuan KJK PEMK Kelapa Gading Barat:

“Sekali doang... Waktu itu ada pengurus sama pengelola juga... Kalo yang aku, kebanyakan marketing... pesertanya yang ikut kebanyakan dari marketing... Sebenarnya materi lebih ke pembukuan juga karena marketing juga harus tahu pembukuan juga kan...” (Vn, P-KGB)

Staf pembukuan KJK PEMK Kelapa Gading Barat menuturkan bahwa ia baru sekali ikut pelatihan, yaitu pelatihan pembukuan dan marketing tersebut. Dalam pelatihan yang diikutinya tersebut para pesertanya lebih banyak dari bagian pemasaran. Sedangkan materinya lebih banyak ke pembukuan, karena staf bagian pemasaran harus mengerti juga

tentang pembukuan. Adapun lamanya pelatihan tersebut adalah 3 hari. Di dalam petihan tersebut juga ada sharing pengalaman diantara peserta KJK PEMK. Sebagaimana dituturkan mba Vn, staf pembukuan KJK PEMK Kelapa Gading Barat:

“Pelatihannya 3 hari...Sharing juga... kesulitannya apa aja gitu...Karena kemaren kebanyakan lebih ke marketing jadi lebih banyak ke lapangan...” (Vn, P-KGB)

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa staf pembukuan KJK PEMK Kelapa Gading Barat sudah mengikuti kegiatan pelatihan yang diperlukan bagi staf pembukuan. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, ia jadi lebih mengetahui tentang pembukuan. Materi yang diterima saat pelatihan sangat membantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai staf pembukuan. Sebagaimana dikemukakan mba Vn:

“Manfaatnya lebih ke aplikasi sih...Selama ini masih dimonitor sama mas Nn...diajarin... Sekarang aku jadi lebih ngerti... Karena akuntansi itu kan banyak logika... ngebantu banget sih buat aku ngerjain pembukuan...” (Vn, P-KGB)

2.3. Pelatihan Manajemen Risiko

Pelatihan Manajemen Risiko ditujukan

bagi para pengurus KJK PEMK. Jumlah peserta yang diundang dalam workshop Manajemen Risiko sebanyak 30 KJK PEMK, dimana setiap KJK PEMK diwakili oleh 1 orang pengurus, sehingga total jumlah peserta yang diundang sebanyak 30 orang. KJK PEMK yang diundang dalam pelatihan ini 75% KJK PEMK yang termasuk kategori baik, dan 25% KJK PEMK yang termasuk kategori kurang baik. Adapun tujuannya adalah agar mereka bisa berbagi pengalaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Kasie Penyaluran dan Penagihan UPDB:

“Kalo manajemen risiko kemarin itu untuk KJK tertentu... sebagian besar yang kita anggap baik... Tapi ada juga KJK yang kita anggap kurang baik supaya dia jadi tahu juga... mungkin 75 : 25 ... siapa tau dengan adanya pengetahuan seperti ini mereka akan bisa me-manage yah... dan disitu juga bisa sharing kan Bu... misalnya kalo ada pelatihan itu permasalahan dari KJK yang kurang bagus tadi bisa mendengarkan pengalaman dari KJK yang sudah bagus...”
(Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan)

Dalam pelatihan manajemen risiko tersebut yang diundang adalah pengurus KJK PEMK, terutama ketuanya, karena menurut Kasie Penyaluran dan Penagihan UPDB, pengurus

adalah orang yang bertanggung jawab terhadap KJK PEMK. Dengan mereka ikut pelatihan manajemen risiko diharapkan mereka mengetahui tentang manajemen risiko, mereka bisa memperkecil risiko di KJK-nya. Berikut penuturan Kasie Penyaluran dan Penagihan UPDB:

“ngga semua KJK yang bagus ikut...karena terbatas... cuma 30 orang... satu KJK satu orang... Pengurus... karena yang bertanggung jawab di KJK itu pengurus... Maka diharapkan pengurus ini bisa tahu manajemen risiko... memperkecil risiko-risiko itu seperti apa.” (Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan)

Senada dengan pernyataan Kasie Penyaluran dan Penagihan, Koordinator/penanggung jawab KJK wilayah Jakarta Utara juga mengemukakan hal yang sama:

“...manajemen risiko itu lebih pada pengelolaan, itu yang mengadakan UPDB... Itu tentang bagaimana cara mengelola management risiko dari pembiayaan, buat pengurus... karena terkait dengan kebijakan, makanya yang diundang pengurus...” (Dnd, Korwil)

Kemudian bagaimana UPDB memilih 30 KJK PEMK dari 253 KJK PEMK yang ada di DKI Jakarta, maka hal itu diserahkan kepada Korwil masing-masing. Untuk wilayah Jakarta Utara, pemilihan KJK PEMK yang diundang diserahkan kepada Korwil KJK Jakarta Utara. Berikut penuturan beliau:

“Yang milih biasanya koordinator, karena dia yang lebih tahu bagaimana kondisi KJK... Nah pertimbangan itu kadang ada karena pertimbangan kebutuhan, ada kegiatan yang pertimbangan pemilihannya karena reward... UPDB itu berharap pengen yang digulirkan tahun itu termanage pembiayaannya dengan baik...” (Dnd, Korwil)

Untuk wilayah Jakarta Utara, KJK PEMK yang diundang ikut pelatihan manajemen risiko ada 5 KJK PEMK yaitu Kelapa Gading Barat, Cilincing, Sukapura, Kebon Bawang, dan Pegangsaan Dua. Dari KJK PEMK Kelapa Gading Barat yang ikut pelatihan manajemen risiko adalah Ketuanya, Pak Bus. Berikut penuturan Pak Bus:

“Terakhir saya ikut pelatihan Manajemen Risiko di Hotel Park Cawang...” (Bus, K-KGB)

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat sudah mengikuti kegiatan pelatihan

manajemen risiko dimana materinya memang penting diketahui oleh seorang ketua KJK. Dengan demikian diharapkan beliau dapat menerapkannya agar KJK PEMK Kelapa Gading Barat dapat meningkatkan kinerjanya.

2.4. Peningkatan Kinerja KJK PEMK

Kegiatan “Peningkatan Kinerja KJK PEMK” yang dilaksanakan di Sudin Jakarta Utara adalah kegiatan yang ditujukan khusus bagi Pengurus, Pengelola dan Pengawas KJK PEMK di wilayah Jakarta Utara. Narasumber kegiatan sosialisasi ini adalah Pak AP, pensiunan UPDB yang kini dikaryakan sebagai Tenaga Ahli Bidang Koperasi, yang tugasnya membantu UPDB dalam melakukan pembinaan terhadap KJK PEMK, terutama dalam menangani KJK PEMK yang bermasalah. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut narasumber membahas tentang “Peningkatan Kinerja KJK PEMK” melalui penguatan perangkat organisasi pada KJK PEMK yaitu: (1) Pelaksanaan Rapat Anggota (2) Tugas dan tanggung jawab pengurus (3) Tugas dan tanggung jawab pengurus

Yang diundang dalam kegiatan sosialisasi tersebut, menurut Koordinator/Penganggung jawab KJK PEMK wilayah Jakarta Utara sekitar 30 KJK, dimana dalam setiap KJK diundang 3 orang. Kegiatan sosialisasi tersebut juga merupakan evaluasi perkembangan dana bergulir KJK PEMK di wilayah Jakarta Utara. Sebagaimana dikemukakan

Korwil KJK Jakarta Utara:

“... kalau yang itu... untuk pengurus dan pengelola... itu kan evaluasi perkembangan dana bergulir...” (Dnd, Korwil)

Memang dalam kegiatan sosialisasi tersebut dikemukakan pula oleh narasumber tentang kondisi pengelolaan dana bergulir pada KJK PEMK Jakarta Utara serta KJK PEMK mana saja yang mendapatkan dana bergulir pada tahun tersebut berikut jumlah dananya. Hal itu dimaksudkan agar KJK PEMK lain yang pada tahun tersebut tidak mendapatkan dana bergulir dapat meningkatkan kinerjanya sehingga bisa mendapatkan dana bergulir lagi pada tahun mendatang. Dalam paparannya, narasumber juga menjelaskan KJK PEMK mana saja yang mendapatkan pendampingan koperasi dan advokasi hukum dan prosesnya sudah sampai mana. Hal tersebut dimaksudkan agar KJK PEMK lain dapat mengambil pelajaran dari kasus-kasus tersebut. Para pengurus dan pengelola KJK PEMK dari Kelapa Gading Barat yang hadir mengikuti kegiatan ‘Peningkatan Kinerja KJK’, yaitu ketua, bendahara dan manajer.

3. Peningkatan Motivasi dan Kerjasama Individu melalui Outbond

Untuk meningkatkan motivasi pengurus dan pengelola KJK PEMK dalam mengelola KJK PEMK, mereka diikutsertakan dalam kegiatan

“Peningkatan Motivasi dan Kerjasama Individu bagi Pengelola ataupun Pengurus KJK PEMK” melalui outbond. Kegiatan outbond tersebut menurut Koordinator/Penanggung jawab KJK PEMK wilayah Jakarta Utara merupakan reward bagi KJK PEMK yang lancar dalam pengembalian dana bergulir. Sebagaimana dikemukakan beliau: “kalau yang lancar rewardnya ada... diklat-diklat team work, outbound...” (Dnd, Korwil)

Kegiatan outbond ini dilaksanakan setiap tahun. Sebagaimana dikemukakan bu Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan UPDB:

“Dalam setahun itu... kemarin kita ada outbond dengan KJK... itu ada untuk pengurus... pengelola.” (Tnt, Kasie Penyaluran dan Penagihan) Manajer KJK PEMK Kelapa Gading Barat pernah mengikuti kegiatan ini selama 3 kali. Sebagaimana dikemukakan beliau: “Outbond ... 3 kali... ke Citarik 2 kali, ke Garut sekali...” (AS, M-KGB)

Kalau ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat pernah ikut outbond sekali yaitu ke Gunung Salak Bogor.

“Outbond sekali ke Gunung Salak, Bogor...” (Bus, K-KGB).

Hal ini diperkuat oleh manajer KJK PEMK Kelapa Gading Barat. Memang kegiatan outbond ini lebih banyak ditujukan kepada pengelola dibandingkan dengan pengurus, karena pengelolalah yang sehari-hari bertugas sebagai pelaksana, yang mengelola dana bergulir KJK PEMK. Sehingga pengelolalah yang lebih sering berhadapan dengan pemanfaat yang beraneka ragam karakteristiknya dibandingkan dengan pengurus.

Kegiatan outbond ini tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama yang dikemas sedemikian rupa sehingga diharapkan para peserta dapat meningkat motivasinya didalam mengelola KJK PEMK walaupun menghadapi berbagai persoalan.

Intinya di dalam kegiatan outbond tersebut pengelola ataupun pengurus diberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam mengelola KJK PEMK. Sebagaimana dikemukakan ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat:

“Yah... itu memotivasi kita... Bahwa pengurus tuh harus begini, harus begitu... intinya memotivasi... Tidak ada materi tertulis, Cuma lisan doang...” (Bus, K-KGB).

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa untuk meningkatkan motivasi dan ke-

mampuan bekerjasama, UPDB mengadakan outbond bagi pengurus/pengelola KJK. Dari KJK PEMK Kelapa Gading Barat yang sudah mengikuti kegiatan tersebut adalah ketua dan manajernya. Manfaat dari kegiatan outond tersebut yaitu meningkatkan motivasi pengurus/pengelola KJK PEMK di dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam mengelola KJK PEMK. Karena mengelola KJK PEMK itu kan banyak suka dukanya. Menghadapi pemanfaat yang sulit ditagih, tentunya itu merupakan tantangan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan Bu AS, manajer KJK PEMK Kelapa Gading Barat:

“Kalo outbond sih untuk kita aja gitu... Penyemangat lah bagi kita gitu... banyak motivasi disitu... Memberi motivasi kepada peserta untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, cobaan... Nah disitu kita dilatih... Misalnya ada yang bandel... jadi kita tahan mental gitu... jangan mudah menyerah...”(AS, M-KGB)

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa outbond yang diselenggarakan UPDB telah menambah motivasi pengurus ataupun pengelola KJK PEMK di dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam mengelola KJK PEMK, seperti dalam menghadapi pemanfaat yang sulit ditagih. Dengan mengikuti outbond, dimana para pengurus ataupun pengelola dari

berbagai KJK berbagi pengalamannya masing-masing, membuat pengurus ataupun pengelola KJK PEMK tidak merasa sendirian di dalam menghadapi persoalan tersebut. Selain itu mendengarkan pengurus ataupun pengelola KJK lainnya bisa mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, membuat mereka terdorong untuk bisa mengatasi permasalahan di KJK-nya masing-masing.

4. Studi Banding ke Koperasi yang dianggap berhasil

Studi banding merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh UPDB yaitu dengan mengajak pengurus ataupun pengelola KJK PEMK mengunjungi koperasi yang dianggap berhasil. Dengan mengikuti studi banding tersebut, diharapkan para peserta dapat mengambil pelajaran yang berharga dari koperasi yang dikunjungi. Umumnya mereka yang diajak adalah KJK PEMK nya lancar dalam pengembalian dana bergulir ke UPDB. Sebagaimana yang dituturkan Koordinator/Penanggung jawab KJK wilayah Jakarta Utara:

“...kalau yang lancar terus suka diajak studi banding juga...”
(Dnd, Korwil)

4.1. Studi Banding ke Padang

Studi banding ke Padang diikuti oleh para pengurus KJK PEMK, termasuk pak Bus, ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat. Kegiatan studi banding ke Padang dilak-

sanakan 2 (dua) tahun yang lalu.. Sebagaimana dituturkan pak Bus:

“...Studi banding sekali ke Padang... kita waktu ke Padang sekitar berapa hari gitu...”
(Bus, K-KGB)

Keikutsertaan ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat dalam kegiatan studi banding ke Padang dibenarkan pula oleh manajernya, bu AS:

“Kalo kemarin ketua, studi banding sekali ke Padang...”
(AS, M-KGB)

Adapun yang dipelajari ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat selama di Padang antara lain bagaimana syarat menjadi anggota koperasi. Karena di koperasi yang beliau kunjungi itu syarat menjadi anggota koperasi cukup berat yaitu disamping harus membayar simpanan pokok, juga harus membayar simpanan wajib selama 8 bulan berturut-turut dan tidak boleh terlambat membayarnya. Selain itu bila anggota koperasi mau meminjam, dia hanya boleh meminjam sebesar duapertiga dari uang simpanannya. Berikut penuturan ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat:

“Waktu studi banding ke Padang... itu kan kita sharing dengan propinsi lain ... Di Padang tuh kalau mau menjadi anggota, minimal harus

punya uang simpanan pokok, simpanan wajib tiap bulan harus membayar sendiri, tidak boleh ada telat... selama 8 bulan rata-rata, baru boleh jadi anggota... Kalau mau pinjam, kalau menurut teori koperasi, dia boleh pinjam dua pertiga dari apa yang dia punya, dari simpanannya... Di Padang sesuai aturan koperasi...” (Bus, K-KGB)

Menurut ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat apa yang dijalankan di koperasi yang beliau kunjungi di Padang tidak bisa sepenuhnya diterapkan di KJK PEMK di DKI Jakarta ini, karena KJK PEMK merupakan program pemberdayaan dimana dananya dibantu oleh pemerintah DKI Jakarta melalui UPDB. Berikut penuturan beliau:

“Kalau kita kan lain... dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan... Dananya memang dikasih oleh pemerintah jadi supaya berdayalah masyarakat di kelurahan itu...” (Bus, K-KGB).

4.2. Studi Banding ke Bali

Studi banding ke Bali pernah diikuti oleh manajer KJK PEMK Kelapa Gading Barat, bu AS. Sebagaimana dikemukakan ketua KJK PEMK Kelapa Gading Barat: “Bu

AS tuh pernah studi banding ke Bali...”. Saat studi banding ke Bali, koperasi yang dikunjungi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera dan KSP Wisuda Guna Raharja di kota Denpasar, Bali. Kedua koperasi tersebut sangat maju, dan merupakan koperasi yang lingkup kerjanya di tingkat propinsi. Sebagaimana dituturkan bu AS:

“Kalau studi banding kita banyak sharing dengan koperasi disana. Kebetulan waktu itu saya di Bali... kita sharing. Usahanya maju dia itu disana... Di Bali itu koperasinya membawahi beberapa kabupaten, koperasinya ada di tingkat propinsi. Sedangkan kita kan scope-nya hanya kelurahan. ...” (AS, M-KGB)

Dengan mengikuti studi banding ke Bali beliau banyak mendapatkan pengetahuan, antara lain bagaimana sebaiknya pendekatan terhadap pemanfaat. Sebagaimana dituturkan Bu AS:

“Manfaatnya banyak terhadap pengelolaan KJK...kita ngikutin dia... termasuk bagaimana pendekatan terhadap pemanfaat termasuk dari sana itu... Contohnya ya kita lihat usahanya dia... misalnya kita jalan pagi... kita lihat bagaimana pedagang nasi uduk yang jadi pemanfaat

*kita, 'bagaimana bu...'... Jadi
kita ambil cara kerjanya dia..."*
(AS, M-KGB)

Selain itu hasil dari studi banding ke Bali juga membuat bu AS merasakan akan pentingnya motto KJK. KJK PEMK Kelapa Gading Barat, yang tadinya tidak memiliki motto, setelah bu AS studi banding ke Bali, jadi punya motto. Motto yang beliau kutip dari koperasi di Bali adalah "Non Profit Oriented but Must Profit". Bu AS juga mengemukakan bahwa motto itu akan memotivasi para pengurus dan pengelola dalam menjalankan KJK, karena walaupun KJK tidak berorientasi pada keuntungan tetapi perlu juga mendapatkan keuntungan yaitu untuk kesejahteraan pengurus/pengelola dan anggota KJK juga. Sebagaimana dituturkan beliau:

"Kita dapat pengetahuan disini...Kebetulan waktu itu saya di Bali... kita sharing... Itu mottonya saya ambil tuh dari Bali "Non Profit Oriented but Must Profit"... Usahnya maju dia itu disana... Di Bali itu koperasinya membawahi beberapa kabupaten... Sedangkan kita kan scope-nya hanya kelurahan... Tapi gapapa kita ngambil ilmunya...Kenapa kita ambil motto itu untuk di KJK kita juga...karena di KJK ini walaupun kita tidak berorientasi pada keuntungan

*tapi kita harus untung juga...
kan perlu juga untuk meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota..."* (AS, M-KGB)

PEMBAHASAN

Dalam menganalisis upaya pemberdayaan pada KJK PEMK, terutama digunakan pendapatnya Jim Ife tentang strategi pemberdayaan untuk meningkatkan power masyarakat dan konsep pemberdayaan dari Pranarka. Selain itu ditambah dengan pendapatnya Eade tentang *capacity building*, serta pendapatnya Killough tentang pengembangan kapasitas lokal.

Bila dikaitkan dengan pendapatnya Ife (2006:75) maka masyarakat kelurahan yang mendapatkan pinjaman dana bergulir ini oleh Ife digolongkan sebagai kelompok yang kurang beruntung secara struktural primer (*Primary Structural Disadvantaged Groups*). Mereka tidak memiliki power untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, mereka juga tidak memiliki power untuk mengakses dan menggunakan sumber daya, terutama sumber daya keuangan; padahal dalam masyarakat dimana kriteria ekonomi begitu signifikan, power akses terhadap ekonomi dan transaksi menjadi begitu penting. (Ife, 2013:68-70) Mereka tidak memiliki dana atau modal untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu diperlukan strategi pemberdayaan untuk memaksimalkan power yang efektif agar mereka bisa mengakses dan menggunakan sumber

daya, dalam hal ini terutama sumber daya keuangan; serta untuk memperbaiki ketimpangan akses terhadap sumber daya.

Terkait dengan strategi pemberdayaan yang dikemukakan Jim Ife (2013:70-71) dimana ada 3 strategi pemberdayaan bagi kelompok yang tidak beruntung (*the disadvantaged*), yaitu (1) Kebijakan dan perencanaan; yang dicapai melalui pengembangan atau perubahan struktur dan institusi untuk menghasilkan akses yang lebih adil terhadap sumber-sumber atau pelayanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat; (2) Aksi sosial dan politik; yang menekankan pentingnya perjuangan politik; (3) Pendidikan dan peningkatan kesadaran; untuk meningkatkan *power* mereka. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi masalah kemiskinan di DKI Jakarta menerapkan strategi pemberdayaan yang pertama dan ketiga, yaitu dengan meluncurkan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), dimana program tersebut memberikan akses permodalan (dana bergulir) dan juga pendidikan dalam bentuk *capacity building*.

Untuk mendukung program tersebut, dibentuklah Unit Pengelola Dana Bergulir di bawah Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan sebagai lembaga yang menyalurkan dana bergulir kepada kelompok masyarakat miskin terutama dalam hal ini yang memiliki usaha mikro. Kemudian dalam rangka men-

yalurkan dana bergulir tersebut dibentuklah Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di setiap kelurahan untuk menjadi mitra UPDB dalam menyalurkan bantuan modal bergulir kepada masyarakat di kelurahan masing-masing yang membutuhkan permodalan. Jadi KJK ini memang sengaja dibentuk untuk menyalurkan dana bergulir dari UPDB.

Dengan dibentuknya UPDB dan KJK, masyarakat golongan miskin yang memiliki usaha mikro dapat mengakses sumber daya keuangan tanpa harus ke bank yang umumnya direpotkan dengan persyaratan-persyaratan administratif dan agunan. Mereka bisa dengan mudah meminjam uang untuk mengembangkan usaha mereka. Mereka jadi memiliki akses terhadap sumber daya keuangan.

Selain melakukan strategi pemberdayaan pertama menurut Jim Ife, terhadap kelompok yang tidak beruntung ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan strategi pemberdayaan yang ketiga, yaitu dengan memberikan pendidikan dalam bentuk *capacity building* kepada pengurus/pengelola KJK PEMK. Selain pelatihan-pelatihan, pengurus/pengelola KJK PEMK juga diajak studi banding dan outbond dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini dilakukan agar pengurus dan pengelola KJK bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, bisa mengelola dana KJK dengan baik. Karena sebagaimana dikemukakan Eade (2005:1) *capacity building* dipandang

sebagai unsur penting jika pembangunan berpusat pada manusia. Mengingat pengurus dan pengelola KJK ini belum tentu memiliki dasar pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola KJK. *Capacity building* juga merupakan investasi dalam organisasi.

Menurut Eade (2005: 107) meningkatkan kemampuan orang untuk dapat mempertahankan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas organisasi merupakan esensi dari *capacity building*. Hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Killough dalam Weil (2013: 702-703) yang mengemukakan bahwa di dalam upaya pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan kapasitas organisasional dari mitra lokal agar mereka bertanggung jawab penuh atas pembangunan mereka sendiri. Mereka perlu didorong agar dapat memobilisasi aset-aset lokal ketimbang tergantung dari sumber-sumber eksternal. Lebih lanjut Killough dalam Weil (2013: 711) juga mengemukakan bahwa membangun kapasitas lokal bagi pembangunan merupakan kunci untuk menjamin keberhasilan jangka panjang yang didasarkan pada efektivitas dan sustainabilitas program maupun pertumbuhan kemandirian komunitas dan organisasi.

Dengan diberikannya pelatihan, studi banding ataupun outbond, para pengurus dan pengelola KJK diharapkan dapat melakukan upaya pemberdayaan terhadap para anggota KJK. Dari temuan lapangan memang terlihat bahwa UPDB berupaya semaksimal mun-

gkin untuk meningkatkan kemampuan para pengurus/manajer KJK PEMK melalui berbagai upaya pelatihan. Bahkan juga dengan melakukan studi banding kepada koperasi yang dianggap berhasil di berbagai daerah.

Dari temuan lapangan terungkap bahwa para pengurus dan manajer KJK PEMK merasakan manfaat dari pelatihan-pelatihan, outbond ataupun studi banding yang dilaksanakan oleh UPDB. Mereka memandang bahwa apa yang mereka peroleh saat pelatihan, outbond ataupun studi banding menjadi bekal bagi mereka dalam mengelola KJK PEMK.

Memang agar KJK PEMK bisa maju dan berkembang, maka para pengurus ataupun manajernya harus mendapatkan pelatihan, sebagaimana dikemukakan Newigwe dalam Ismawan (2001:101) bahwa agar koperasi bisa maju maka manajer harus mendapatkan pelatihan tentang dasar-dasar koperasi, administrasi dan pembukuan, pemasaran, perencanaan dan pembiayaan, dinamika kelompok, dan lain-lain.

Bila dikaitkan dengan pendapatnya Pranarka tentang pemberdayaan, maka upaya pemberdayaan yang dilakukan UPDB terhadap para pengurus dan manajer KJK PEMK ini belum mengarah pada konsep pemberdayaan yang sebagaimana yang dikemukakan Pranarka. Karena menurut Pranarka, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang

menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan atau proses yang pertama tadi dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. (Priyono dan Pranarka, 1996: 56-57)

KJK PEMK merupakan organisasi yang dibentuk karena adanya program PEMK ini. Setiap kelurahan harus membentuk KJK PEMK agar dapat menjadi mitra UPDB dalam menyalurkan dana bergulir. Melihat proses terbentuknya KJK PEMK tampaknya tidak sesuai dengan prinsip pemberdayaan sebagaimana yang dikemukakan Priyono dan Pranarka, karena tidak ada upaya menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Demikian juga bila melihat pendapatnya Shardlow dalam Adi (2013: 206) yang mengemukakan bahwa pemberdayaan itu membahas tentang bagaimana individu,

kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Hal ini tidak terjadi dalam pembentukan KJK PEMK. Pembentukan KJK PEMK semacam diinstruksikan, bukan atas keinginan warga kelurahan.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh UPDB kepada para pengurus dan manajer KJK PEMK ini lebih bersifat *capacity building*, yaitu meningkatkan kapasitas mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mereka dapat mengembangkan KJK PEMK di wilayahnya.

KESIMPULAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEMK) merupakan program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memberdayakan usaha mikro yang ada di kelurahan melalui bantuan permodalan. Dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK), Unit Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta. (UPDB) bermitra dengan Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK).

KJK PEMK Kelapa Gading Barat merupakan KJK PEMK yang lancar dalam pengembalian angsuran dana bergulir kepada

UPDB. Temuan lapangan menunjukkan bahwa memang ada upaya pemberdayaan dari UPDB kepada para pengurus/pengelola KJK PEMK agar mereka memiliki kemampuan dalam mengelola KJK PEMK, yaitu dalam bentuk *capacity building*, berupa pelatihan, studi banding dan outbond. Dengan upaya pemberdayaan tersebut diharapkan para pengurus dan pengelola koperasi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat mengembangkan KJK PEMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. (Edisi Revisi 2012). Cetakan kedua. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Buku Saku Pemantapan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bergulir. Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013.
- Eade, Deborah. (2005). *Capacity Building: An Approach to People-Centered Development*. UK: Oxfam GB.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2006). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Australia: Pearson Education Australia.
- Ife, Jim. (2013). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Ismawan, Bambang. (2000). *Pemberdayaan Orang Miskin: Refleksi Seorang Pegiat LSM*. Jakarta: Puspa Swara.
- Korten, David C. 2002. *Menuju Abad ke 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global (terjemahan)*. Edisi ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lister, Ruth. 2010. *Poverty*. Cambridge: Polity Press.
- Minichiello, Victor. et.al. (1995). *In-depth Interviewing: Principles, Techniques, Analysis*. 2nd Sydney : Longman Australia Pty Ltd.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. 6th Edition. USA: Pearson Education, Inc.
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka (Penyunting). (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Sakethi, Team Mirah. (2010). PPMK: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta: PT Mirah Sakethi. www.beritajakarta.com/download/ppmk_ver_ind.pdf diakses pada tanggal 29 Desember 2012.

Weil, Marie. Michael Reisch dan Mary L. Ohmer (Editor). (2013). *The Handbook of Community Practice*. USA: SAGE Publications, Inc.